

MEMBENAHAI SISTEM PEMBINAAN OLAHRAGA KITA

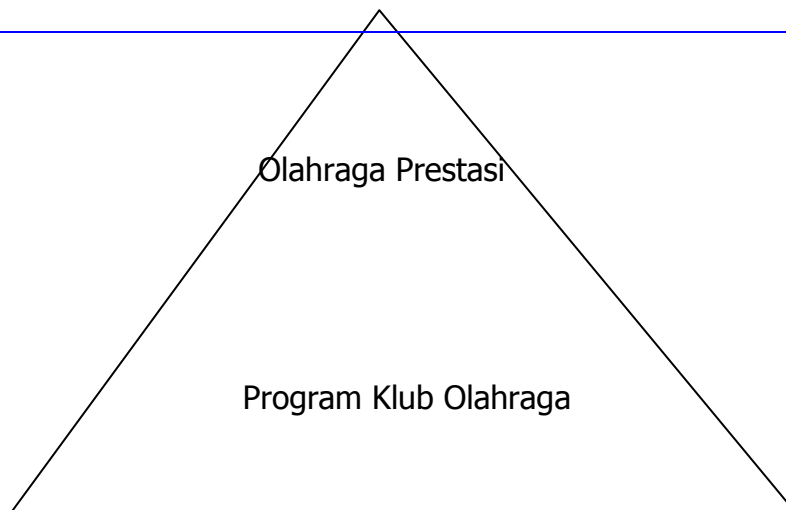
Oleh: Agus Mahendra

Keterpurukan olahraga kita di Busan pada Asian Games XIV yang lalu, telah mendorong penulis untuk memikirkan sebab-sebabnya. Pokok persoalan yang mengemuka, ternyata terletak pada kesalahan kita dalam menata sistem pembinaan olahraga kita. Selama ini, proses pembinaan olahraga kita lebih diwarnai corak potong kompas (crash program), sehingga tidak pernah memperlihatkan hasil yang konsisten. Kemajuan mungkin tetap ada, tetapi sulit dipertahankan konsistensinya. Apa yang dapat penulis pahami, masyarakat olahraga kita masih salah dalam mengimplementasikan pola pembinaan yang dikatakannya mengikuti pola piramid.

Model pembinaan bentuk segi tiga atau sering disebut pola piramid seharusnya berporos pada proses pembinaan yang bersinambung. Dikatakan bersinambung (kontinum) karena pola itu harus didasari cara pandang (paradigma) yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Artinya, program tersebut memandang penting arti pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi interskolastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk training camp bagi para bibit atlet yang sudah terbukti berbakat.

Dengan demikian, corak ini dapat dipastikan agak berbeda dari yang ditempuh dalam pembinaan olahraga di Indonesia umumnya, misalnya program PPLP dan Ragunan, yang biasanya melupakan arti penting dari program penjas dan program olahraga rekreasi, tetapi langsung diorientasikan kepada puncak tertinggi dari model piramid. Yang ada bukan gambar pola piramid, tetapi lebih berupa gambar sebuah pencil (orang lebih suka menyebutnya sebagai flag pole model yang berarti model tiang bendera).

Secara tradisional, program pengajaran pendidikan jasmani digambarkan sebagai rantai dasar dari sebuah segitiga sama kaki, atau yang sering disebut sebagai bentuk piramid. Tepat di atasnya terdapat program olahraga rekreasi, atau lajim pula disebut program klub olahraga. Sedangkan di puncak segitiga terletak program olahraga prestasi.



Program Pendidikan Jasmani

Model Konseptual Hubungan antara Penjas dan Olahraga

Program pengajaran pendidikan jasmani adalah tempat untuk mengajarkan keterampilan, strategi, konsep-konsep, serta pengetahuan esensial yang berkaitan dengan hubungan antara kegiatan fisik dengan perkembangan fisik, otot dan syaraf, kognitif, sosial serta emosional anak. Ini berarti bahwa program pendidikan jasmani yang baik bertindak sebagai dasar yang kokoh dan solid untuk seluruh program olahraga dan aktivitas fisik di sekolah dan masyarakat.

Pada tahap kedua, program olahraga yang bersifat rekreasi (dalam klub olahraga sekolah) merupakan upaya pengembangan dan perluasan program pendidikan jasmani yang sifatnya inklusif untuk semua anak. Pada program rekreasi inilah para siswa diperkenankan untuk memilih cabang olahraga yang diminatinya, serta disesuaikan dengan potensi atau bakat dirinya. Program ini di Indonesia lazim disebut program ekstra-kurikuler, yang seharusnya menyediakan kegiatan-kegiatan olahraga di luar struktur kurikulum dan program pendidikan jasmani.

Pada sekolah-sekolah di negara-negara yang menganut sistem olahraga melalui persekolahan, program olahraga ekstra-kurikuler ini dikelola oleh klub-klub olahraga yang dikembangkan di sekolah dengan sistem voluntir dan sekaligus bersifat wirausaha. Klub tersebut didirikan oleh organisasi sosial yang beragam, dari mulai perkumpulan orang tua, kepemudaan, klub olahraga murni, hingga para guru penjas sekolah yang bersangkutan, yang mengelola klubnya dengan format kewirausahaan bekerja sama dengan pihak sekolah.

Dengan format tersebut, para pengelola menggalang kerjasama dengan sekolah. Mereka mengajukan proposal kepada sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, dengan perjanjian kerjasama bagi hasil atau sewa kontrak; sedangkan pihak pengelola menyediakan program, pelatih, serta mengelola dana yang dibayarkan anak/siswa anggota klubnya. Dengan demikian, di sekolah tersebut bisa berdiri bermacam-macam klub olahraga, dari mulai olahraga individual seperti atletik, senam dan renang, olahraga beregu seperti cabang permainan (voli, basket, sepak bola, bola tangan), olahraga beladiri hingga olahraga petualangan atau pencinta alam.

Program yang ditawarkan oleh klub-klub tersebut bervariasi dari yang sifatnya rekreatif hingga ke tingkat persiapan untuk memasuki olahraga prestasi. Hal ini biasanya ditunjang oleh kurikulum pengembangan yang jelas, yang biasanya merupakan pengadopsian dari sistem pembinaan yang dikembangkan oleh setiap induk organisasi olahraga. Dengan demikian, pada program klub olahraga ini setiap pesertanya secara jelas terpetakan posisinya, apakah ia masuk level pemula, level lanjutan, atau level mahir. Bahkan untuk olahraga tertentu, misalnya pada klub senam, level-level tersebut diperinci lagi misalnya dengan mengelompokkan pelevelan ini pada peringkat yang lebih detil: Pemula dibagi ke dalam tiga level (level 1, level 2, dan level 3), Lanjutan dibagi ke dalam 3 level (level 4, level 5, dan level 6), kemudian Mahir juga dibagi ke dalam 3 level, yaitu level 7, level 8, dan level 9. Sedangkan di atas itu semua, level 10 mewakili tingkat senior.

Dengan sistem semacam itu, yang mana setiap level menunjukkan tingkat penguasaan keterampilan tertentu yang juga sudah ditentukan, akan cukup jelas kapan siswa dapat meningkat atau memperbaiki levelnya ke level berikut, serta persyaratan kompetensi apa yang harus dilewatinya melalui sebuah mekanisme ujian kenaikan tingkat atau melalui kejuaraan. Di samping itu, cukup jelas juga kewenangan pelatih dan penguji (wasit), yang untuk mampu menjalankan fungsinya pada level tertentu pun harus pula memiliki kompetensi dan kewenangan pada peringkat tertentu, apakah ia pelatih atau wasit pemula, pelatih atau wasit lanjutan, atau termasuk pelatih atau wasit tingkat mahir (nasional) dan bahkan tingkat internasional.

Tidak kalah pentingnya dari sistem yang diberlakukan pada klub-klub sekolah di atas adalah (menciptakan) sistem kompetisi yang teratur dan tersistem. Kompetisi merupakan sebuah kewajiban bagi klub yang ada di sekolah, untuk minimal menyelenggarakan kompetisi antar kelas di lingkungan sekolah tersebut, atau lajim di sebut program intramural. Bahkan kalau mungkin klub yang bersangkutan mampu (menciptakan) menyelenggarakan program kompetisi ekstramular (antar sekolah) melalui cara kerja sama dengan klub cabang olahraga sejenis yang ada di sekolah-sekolah lain untuk bertindak sebagai penyelenggara. Sifat kompetisi

dirancang dalam format yang sangat sederhana, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi, tetapi mampu membangkitkan nilai kebanggaan pada para pesertanya, serta yang paling penting adalah dimanfaatkannya kompetisi itu sebagai ajang untuk membina nilai dan sifat-sifat luhur keolahragaan bagi para peserta. Dengan demikian, siswa mampu menyelami dan menginternalisasi nilai-nilai sportivitas, fair play, kejujuran, semangat pantang menyerah, menghargai keunggulan diri sendiri dan lawan, serta membina semangat kerja sama, korp, serta menjunjung sikap hormat pada orang lain.

Pada tataran terakhir, program olahraga prestasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari dua program sebelumnya. Pada tataran ini, para guru penjas dan para pelatih memanfaatkan tersedianya data mengenai potensi dan bakat anak dari masing-masing sekolahnya untuk disalurkan pada program pemuncakan dalam bentuk training camp.

Training camp adalah suatu program yang dirancang atas inisiatif masyarakat olahraga, untuk menyediakan program yang selaras dengan misi peningkatan prestasi tanpa harus kehilangan dasar pengembangan dan menelantarkan landasan di tahap paling dasar; pendidikan jasmani. Program ini disediakan dalam bentuk sport centers, yang formatnya bisa bervariasi di antara kabupaten atau kota, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusianya.

Idealnya, training camp dalam format sport center ini dimiliki oleh setiap kota atau kabupaten, didasarkan pembagian wilayah. Maksudnya, jika sebuah kabupaten atau kota terdiri dari empat wilayah, maka minimal di satu wilayah terdapat satu sport centers, yang masing-masing sport centers tersebut mampu menyediakan beberapa program training camp untuk cabang olahraga yang dijadikan andalan kabupaten atau kota tersebut.

Setiap sport centers dikelola oleh para profesional di bidangnya masing-masing, dengan program dan kegiatan yang selalu direncanakan dan diperbaiki secara berkala, sehingga mampu menampung para siswa potensial dan berbakat dari setiap jenjang sekolah. Program training camp ini dapat diibaratkan sebagai sebuah *elite stream*, yang mendampingi dan melanjutkan program dari klub olahraga yang bisa juga disebut sebagai *recreational stream*.

Istilah *recreational stream* dan *elite stream* sudah lama dikenal dalam sistem pengembangan suatu cabang olahraga di negara maju. *Recreational stream* adalah sebuah program yang disediakan bagi seluruh siswa yang berminat memasuki suatu klub cabang olahraga tertentu, dengan tujuan memberikan pengenalan terhadap dasar-dasar keterampilan gerak

olahraga sekaligus menanamkan rasa kesukaan dan kecintaan anak terhadap cabang olahraga yang diikutinya. Mengingat programnya ditujukan bagi mayoritas anak, maka program yang ditawarkan pun dirancang agar bisa sesuai dengan mayoritas anak; tidak terlalu sulit, dan memungkinkan anak bergerak maju sesuai dengan tingkat kemampuannya tanpa harus dipaksakan. Peningkatan peringkat anak ditentukan oleh tingkat penguasaannya terhadap paket yang sudah disediakan pada peringkat itu. Jika seorang anak dipandang sudah mampu menguasai 70 s/d 80 persen dari keterampilan yang disyaratkan, maka anak itu dapat meningkat ke peringkat selanjutnya.

Di pihak lain, *elite stream* adalah program yang dirancang khusus untuk anak-anak yang dianggap berbakat, terutama setelah diyakini berbakat melalui pengujian pemanduan bakat, baik secara antropometrik, biomotorik, serta psikologik dari cabang olahraga yang diikutinya. Program yang dirancang pada *elite stream* ini harus memungkinkan anak meningkatkan prestasinya secara meyakinkan, karena programnya sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip training, termasuk pula dalam hal intensitas, volume, durasi, serta frekuensinya. Dengan demikian, anak-anak yang akan dilibatkan dalam elite stream adalah anak-anak atau siswa yang sudah dipastikan mampu mengikuti secara ketat dan teratur program yang disediakan.

Jika proses pembinaan di Indonesia sudah mengikuti alur seperti yang diuraikan di atas, barulah kita bisa mengatakan bahwa pola pembinaan kita mengikuti pola piramid. Dan hanya dengan cara seperti itulah prestasi olahraga Indonesia dapat dibangkitkan kembali. Untuk itu, kualitas program pendidikan jasmani di sekolah perlu diperbaiki, program pendidikan kepelatihan harus pula diperbaiki, terutama supaya para lulusannya tidak terlalu bertumpu pada keharusan menjadi guru dan pegawai negeri; di samping itu, setiap induk organisasi pun harus diberdayakan, sehingga mereka mampu mengerti dan sanggup membuat sistem bagi cabang olahraganya masing-masing; dan yang terlebih penting dari itu semua, cara pandang kita terhadap pengelolaan olahraga harus bersifat memberdayakan serta mensinergikan semua pihak. *** (Dosen FPOK-Universitas Pendidikan Indonesia).

IRONI APA LAGI YANG HARUS KITA TANGGUNG?

Oleh: Agus Mahendra, MA.

SEKIAN puluh tahun kita berkiprah dalam olahraga (prestasi), tetapi hingga sekarang persoalan dan wacana kita selalu terbatas pada pertanyaan: bagaimanakah kita mampu unggul di SEA

games? Dalam skala yang lebih mikro, daerah pun memfokuskan pertanyaan serupa: bagaimana mereka mampu unggul di PON? Akibatnya, pikiran kitapun selalu terpaku pada upaya menjawab pertanyaan itu dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu jangan salahkan jika jawaban yang diberikan oleh orang KONI Pusat termasuk pemimpinnya selalu serupa: "Pelatnas!" Ya, pelatnas, jika mungkin pelatnas jangka panjang. Daerah pun begitu: jawabannya adalah Pelatda!

Dengan kerangka berpikir seperti itu, siapapun yang menjadi pemimpin KONI, baik daerah maupun Pusat, visinya tidak pernah jauh dari upaya memperbaiki kualitas pelatda atau pelatnas. Takarannya pun sungguh simpel; sekedar apakah ketua KONI mampu menggalang dana yang mencukupi untuk melaksanakan Pelatda/nas yang lebih baik? Lalu ramai-ramailah dicari pejabat atau pengusaha yang diperkirakan mampu melaksanakan tugas itu.

Karenanya, jangan pernah berharap bahwa pemimpin KONI yang dicari setiap menjelang Musornas atau Musorda ditakar kompetensinya dari bagaimana konsepnya tentang olahraga dan bagaimana merumuskan sistem olahraga nasional yang bisa dijadikan acuan bagi perumusan sub-sistem pembinaan yang bisa diberlakukan oleh induk-induk organisasi dan instansi terkait lainnya. Lebih jauh, KONI akhirnya abai dengan urgensi pembinaan komprehensif, yang didorong oleh mencuatnya ambisi pribadi dan *chauvinisme* sempit tentang makna "pengabdian" melalui olahraga.

Hal yang sama terjadi juga di induk organisasi. Karena tidak adanya acuan tentang bagaimana menjalankan fungsi pembinaan di tingkat induk organisasi, tidak ada koreksi sama sekali ketika induk organisasi pun meniru-niru format yang dilakukan KONI.

Jangan heran mendengar visi dari setiap top organisasi yang hanya berkutat di masalah pelatnas, yang implementasinya hanya dituangkan dalam perencanaan program latihan jangka panjang. Sungguh mengherankan bahwa program latihan yang semestinya hanya menjadi tugas tim pelatih sudah menyita sedemikian banyak waktu dari organisasi olahraga setingkat PB, misalnya.

Dalam kondisi seperti itu, bidang tugas yang aktif dalam keseluruhan organisasi hanya bidang pembinaan prestasi. Bidang-bidang tugas yang lain seolah terlupakan atau dianggap tidak penting, sehingga lambat tapi pasti orang-orangnya merasa disisihkan dan mundur teratur tahu diri.

Banyaknya bidang yang tidak aktif, otomatis menurunkan kinerja organisasi olahraga yang bersangkutan, terutama bidang-bidang non teknisnya. Ambil contoh bidang organisasi dan pembinaan daerah, mereka pasti tidak diberi alokasi dana yang memadai untuk menjalankan programnya (kalau pun ada). Lebih sering, mereka sudah tahu diri terlebih dahulu, dengan berancang-ancang tidak mengajukan program apapun yang berkaitan dengan pembenahan organisasi dan pembinaan daerah, apalagi yang terkait dengan pembinaan klub.

Karena tidak ada yang membina, klub-klub olahraga yang sudah adapun lambat laun menghilang. Mereka biasanya satu persatu rontok akibat salah urus dan kurang terpenuhinya kemampuan minimal dalam manajemen pengelolaan klub. Ini tentu sebuah ironi yang memprihatinkan.

IRONI lain tentu tidak luput dari konsekuensi mengelola olahraga secara serampangan demikian. Yakni: Di Indonesia, mengurus olahraga itu tidak perlu keahlian. Yang penting ada kemauan untuk mengabdikan, tanpa pengetahuan dan keahlian yang memadai pun sudah dipandang cukup.

Kondisi demikianlah yang menyebabkan profesi-profesi dalam bidang olahraga di Indonesia tidak pernah berkembang. Tidak ada kepentingan bagi universitas-universitas maju untuk mengembangkan program studi-program studi seperti manajemen olahraga, basic athletic trainer, sport journalism, sport therapy, sport tourism, atau sport industry, karena memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat olahraga.

Cukuplah cetak guru penjas dan pelatih yang tidak jelas kualifikasinya, toh kebutuhan pelatih sudah terpenuhi dari eks-eks atlet yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Sejalan dengan kondisi demikian, tidak mengherankan bahwa kajian-kajian olahraga dalam konteks filosofis dan sosio-kulturalnya amat jarang ditemukan. Olahraga sungguh bukan wilayah yang menarik bagi kajian filsafat olahraga atau kajian budaya secara umum, karena tidak ada tempat sama sekali bagi kajian seperti itu.

“Olahraga,” menyitir sindiran Mendiknas A. Malik Fajar dalam satu kesempatan, “sangat kering atau ‘suwung’ dari sentuhan-sentuhan kelembutan hati nurani.”

Di sisi lain, pemerintah pun sepertinya adem ayem saja dengan permasalahan olahraga, tersibukkan oleh urusan-urusan yang lebih mendesak. Keberadaan fasilitas olahraga di lingkungan perkotaan seakan tidak diakui peranannya dalam meredam gejolak sosial masyarakatnya. Bisnis-bisnis center yang berdiri di atas peruntukan lapangan olahraga makin hari makin berhamburan tak terkendali.

Masyarakat sekitarliah yang menuai akibatnya. Institusi-institusi nonformal dalam bentuk kegiatan olahraga bersama di tingkat RT, RW hingga Kecamatan secara drastis menghilang, padahal itulah yang sejatinya mampu menampung gejolak rasa para remaja dalam masanya yang labil. Sungguh menjadi sebuah kehilangan besar bagi generasi muda sekarang, untuk mampu menumbuhkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik yang aktif.

Entah apa jadinya jika masyarakat olahraga tetap abai dengan permasalahan krusial demikian, sementara sebagian besar dari kita masih sibuk mencari-cari “pejabat” manakah yang cocok memimpin KONI agar di SEA Games mendatang kita tidak mendapat malu? Ironi apalagikah yang harus ditanggung oleh olahraga kita? *** (Penulis adalah Dosen FPOK Universitas Pendidikan Indonesia)

MENPORA Harus Berdayakan Olahraga Berdimensi Luas

Oleh: Agus Mahendra

SIMPANG-SIURNYA pandangan dan harapan para *stake holders* olahraga terhadap kemunculan kembali Kementerian Pemuda dan Olahraga (MENPORA) pada dasarnya menunjukkan satu hal, yaitu bahwa cara pandang kita terhadap olahraga masih sangat partial dan sarat dengan kepentingan tertentu.

Tengok saja harapan yang mengemuka terhadap isu munculnya kementerian ini. Ada yang berharap bahwa kementerian tersebut harus berupa Departemen Olahraga, ada yang mengusulkan agar kementerian ini lepas dari embel-embel pemuda, dan ada juga yang menitip pesan agar kementerian ini digabung dengan departemen pariwisata. Bahkan terakhir, ada pula yang mengusulkan agar Menpora membawahi KONI.

Apa artinya semua ini? Semua mengindikasikan bahwa cara pandang kita terhadap olahraga masih membedakan secara tegas dan diskrit antara olahraga prestasi dan olahraga non-prestasi. Maksudnya, adanya Menpora hanya dikaitkan dengan bagaimana agar olahraga kita mampu berbicara lebih nyaring di arena internasional, yang juga berarti satu hal, yaitu kementerian olahraga seolah berkewajiban menyediakan dana lebih besar pada pembinaan olahraga prestasi.

Pandangan demikian memang tidak bisa dielakkan manakala kita menengok kembali sejarah perkembangan olahraga kita yang dilontarkan sebagai alat politik bangsa dalam menegakkan postur bangsa yang sudah sekian abad terpuruk oleh penjajahan. Hingga sekarang, sikap *minder* tersebut masih melekat pada para *stake holders* olahraga kita, yang jika berbicara olahraga, selalu dikaitkan dengan bagaimana kita membuktikan diri sebagai bangsa dan negara yang besar dalam dan melalui olahraga.

Akibatnya, olahraga kita terus menerus berada dalam suatu *distance* dari kepentingan masyarakat luas. Tidak banyak orang yang merasakan manfaat olahraga, kecuali segelintir orang yang ada di dalamnya; ya pengurus KONI dan Top Organisasi, para pelatih, dan segelintir atlet yang merasa diri berbakat. Lalu masyarakat luas? Mereka tidak pernah merasakan manfaat dari olahraga yang sering dikibarkan oleh pihak tertentu sebagai kepentingan bangsa dan negara.

Sungguh menjadi sangat artifisial jika para pemuka olahraga menyatakan bahwa olahraga adalah alat pembangunan dan pembentuk karakter bangsa (*nation and character building*). Lha, yang dibentuk karakternya hanya segelintir orang kok. Bagaimana bangsa sebagai sebuah entitas merasa terdidik melalui olahraga kalau yang diperhatikan hanya para atlet saja?

Coba pula tengok kiprah kita dalam berolahraga. Sedemikian besar dana dihabiskan untuk pesta olahraga nasional (PON). Setiap propinsi mengerahkan energi habis-habisan untuk bisa membuktikan diri unggul dari propinsi lain (wujud lain dari kemimpinan kita?). Tetapi apakah PON atau peristiwa olahraga lain tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas? Apakah dengan adanya PON membuat banyak orang terinspirasi untuk semakin giat berolahraga? Apakah PON benar-benar mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat? Apakah PON membuat setiap propinsi berlomba-lomba menyediakan infrastruktur olahraga untuk masyarakat luas? Apakah PON membuat bidang-bidang karir keolahragaan menjadi lebih terbuka untuk dimasuki oleh banyak pihak?

Dalam kasus lain, mari kita tengok kiprah KONI dan Top Organisasi keolahragaan kita. Karena merasa terbelenggu oleh mandat pengembangan olahraga prestasi, maka di mata mereka kewajiban satu-satunya dalam pembinaan adalah menyelenggarakan Pelatnas dan Pelatda, yang juga hanya melibatkan segelintir atlet. Kata kunci pemassalan dan pembibitan seolah-olah

hilang dari kamus kerja mereka.

Akibatnya, mereka merasa tidak wajib mengembangkan klub-klub olahraga untuk memperluas komunitas olahraganya. Mereka tidak merasa perlu menyusun dan mengembangkan sebuah sistem pengembangan (*developmental system*) agar masyarakat luas terlibat di dalamnya. Mereka hanya puas kalau keberadaan mereka di dalamnya tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, semakin sedikit anggota komunitas olahraganya, semakin amanlah posisi mereka.

Mereka lupa, bahwa hanya komunitas besarlah yang mampu mendukung roh-hidup olahraganya. Mereka tidak sadar bahwa hanya komunitas yang seharusnya mereka binalah yang akan rela membayar tiket untuk menonton kompetisi yang digelarnya. Mereka juga abai dengan kenyataan bahwa komunitas besarlah yang akan menyediakan dana sumbangan yang memadai lewat iuran keanggotaan dan penjualan *merchandises*, termasuk berminatnya berbagai sponsor kepada olahraga mereka.

Tapi mereka memang pintar berkelit. Toh dana akan turun dari pemerintah (Pusat atau Daerah) menjelang SEA Games atau PON. Toh mereka bisa memilih menteri atau pengusaha konglomerasi untuk dijadikan ketua agar dana tetap tersedia. Toh, masih banyak para eks-jenderal yang aktivis yang pintar melobi pihak penguasa dana segar. Dsb.

Jika demikian dan tetap begitu cara pandang kita terhadap olahraga, maka kementerian pemuda dan olahraga akan disepelkan kehadirannya, karena jelas MENPORA tidak akan mampu memenuhi harapan mereka.

Lalu bagaimana seharusnya kita memandang kehadiran Menpora? Mudah-mudahan kesemuanya itu dipandang sebagai kewajiban pemerintah untuk lebih mendekatkan lagi manfaat olahraga bagi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri.

Maksudnya, kehadiran Menpora mudah-mudahan dilihat sebagai upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik bangsa agar menjadi bangsa yang tangguh dan bermartabat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia, serta berbagai manfaat lain. Dengan demikian, sama seperti fungsi dari kementerian lain yang tentunya diarahkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan bangsa kita.

Karenanya, marilah kita sepakati bahwa cara pandang kita terhadap olahraga jangan disempitkan hanya pada olahraga prestasi. Tugas dan fungsi dari kementerian pemuda dan olahraga adalah upaya memberdayakan olahraga dalam dimensi luas; untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pengembangan prestasi, pengembangan ekonomi rakyat melalui olahraga, pengembangan kualitas bangsa dengan menjadikan olahraga sebagai alat pendidikan, dan masih banyak lagi.

Dalam mekanisme kerjanya, tentu Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, justru kementerian olahraga perlu mendorong lahirnya institusi-institusi yang mampu mengakselerasi program pemberdayaan olahraga sesuai arah dan harapan yang diinginkan. Termasuk mempertahankan institusi yang sudah ada dengan lebih mengefektifkan fungsinya.*** (**Agus Mahendra**: Dosen FPOK UPI di Bandung)

Olah Raga, "Life Skills", dan "Life Skill Center"

Oleh Agus Mahendra

GAGASAN memberikan tunjangan asuransi kepada atlet Jabar berprestasi seperti dikemukakan oleh Ketua Umum KONI Jabar, pada dasarnya sejalan dengan gagasan Menpora untuk membentuk Bapornas (Badan Pembina Olahraga Nasional), yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan atlet.

Sungguh sebuah niat yang mulia, mengingat perhatian pemerintah terhadap olah raga selama ini masih amat rendah. Inilah bukti bahwa pemerintah belakangan menyadari bahwa para olah ragawan Indonesia harus mendapat kepastian hidup dari pilihannya menekuni karir keolah ragaan.

Namun demikian, dalam beberapa hal gagasan memberikan dana pensiun dan asuransi mengandung beberapa kelemahan, di antaranya keterbatasan dana itu sendiri, orientasi jangka pendek, serta praktek yang bertentangan dengan peribahasa: "berikan kail, bukan ikannya."

Kata kunci "jaminan atau kepastian hidup" harus kita garis bawahi, manakala kita ingin mengapresiasi gagasan Menpora dan Ketua KONI Jabar. Tapi bukan dengan cara instan seperti memberikan dana pensiun atau asuransi begitu saja. Dengan melihatnya secara berbeda, penulis ingin mendukung gagasan "memberikan jaminan hidup" tersebut dengan mengajukan beberapa pemikiran.

Gagasan memberikan dana pensiun dan asuransi dipicu oleh beberapa sebab. Yang paling mencolok adalah gejala menganggurnya atlet dan gejala komersialisasi serta komodifikasi karier atlet, sehingga atlet perlu terus-menerus dimanjakan oleh tunjangan dan bonus.

Coba simak kekhawatiran Eka Santosa tentang kecenderungan kepindahan atlet ke daerah lain karena alasan uang. Ini sebenarnya merupakan buah pahit dari model penghargaan pada atlet dengan cara memberikan bonus (apalagi jor-joran) yang tidak memperhitungkan eksensya. Padahal jika sejak dulu penghargaan pada pengabdian atlet ini dirancang dengan bijaksana, kita tidak akan menuai badai komersialisasi tersebut.

Fenomena menganggurnya eks olah ragawan, di sisi lain, terjadi akibat tidak terbukanya para pembina terhadap gagasan dan paradigma pembinaan yang memberdayakan atlet dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak atlet yang tidak memiliki "keterampilan hidup" (*life skills*), yang mendukung suksesnya dalam memecahkan persoalan hidup, termasuk dalam mencari nafkah dan mengaktualisasikan diri secara bermakna.

Persoalannya adalah, mengapa umumnya para olah ragawan banyak yang tidak memiliki kecakapan hidup tersebut? Para ahli menunjuk pada model pembinaan yang dijalankan yang mendorong terjadinya *foreclosure identity*, yaitu kecenderungan seseorang menekuni dunia olah raga sebagai satu-satunya kegiatan, dengan mengabaikan bidang atau aspek hidup yang lain.

Menghadapi gejala demikian, sebaiknya KONI dan Menpora menempuh jalan untuk mengembangkan kecakapan hidup para atlet dalam bentuk *Life Skill Center* (LSC).

Melalui program ini, atlet tidak hanya dibina kemampuan prestasi olah raganya, melainkan dikembangkan pula keyakinan dan kemauannya untuk hidup sukses.

Satu premis yang dijadikan landasan dari program kecakapan hidup adalah: jika seseorang dapat berprestasi dalam olah raga, maka iapun harus percaya bahwa ia akan berprestasi sama baiknya dalam bidang-bidang lainnya, termasuk dalam kariernya.

Program yang bisa dijadikan unggulan dalam LSC adalah membantu para atlet menemukan bakat terkuatnya dalam karier serta mengembangkan jiwa kewirausahaan. Berbagai kursus dan program sertifikasi disediakan, sehingga para atlet melihat jalan terang untuk mengaktualisasikan karir yang dipilihnya. Kalau perlu, LSC pun didukung satu komisi yang juga menyediakan modal untuk perintisan usaha atlet.

Bagi atlet yang kuat jiwa dagangnya, diberikan ilmu dagang dan strategi pencapaiannya. Bagi yang kuat jiwa seni dan ingin berkiprah di sana, disediakan program yang mampu memperkokoh bakat seninya. Demikian juga bagi yang ingin membuka industri olah raga atau memiliki klub olah raga, dibuka jalan ke arah itu.

Intinya, mereka bisa menjadi pelatih yang berhasil, mereka dapat menjadi manager atau pemilik klub olah raga yang bergengsi, atau bahkan mereka dapat juga menjadi pebisnis atau pengusaha sukses, di samping karier-karier umum seperti jurnalis, penyiar, guru, model, hingga aktor sekalipun.

Mewujudkan LSC yang berhasil tentu perlu didukung paradigma yang berbeda dari para pembina olah raga Indonesia, dari mulai KONI Pusat, KONI Daerah, hingga para pengurus Cabor, baik PB maupun Pengda. Tanpa itu semua, mustahil kita dapat memecahkan persoalan kritis kesejahteraan atlet dan olah raga pada umumnya. (Penulis, Dosen FPOK UPI-Bandung)***

Sirkus dan Olah Raga, Misteri Gerak Manusia

Oleh Agus Mahendra

27 Februari 2005

BELAKANGAN ini, beberapa stasiun televisi swasta kita rajin menayangkan acara sirkus. Di dalamnya kita dapat melihat berbagai atraksi gerak yang amat mengagumkan, mulai dari *trapeze* (palang gantung), *juggling* (lempar tangkap bola atau gada), *rope-dancing*, salto ungit, trampolin, serta pertunjukan binatang, dan badut.

Mungkin banyak yang setuju bahwa pertunjukkan sirkus lebih banyak miripnya dengan senam artistik, yang banyak berisi unsur akrobatik dan *tumbling*.

Unsur akrobatik adalah gabungan keseimbangan, kelentukan, serta kekuatan menumpu dalam gerak lamban. Akrobat ini dipertontonkan lewat satu, dua, hingga tiga orang pemain, seperti gadis plastik tak bertulang, *rope dancing*, dan variasi *press handstand* pada alat

tumpu yang bertambah tinggi.

Sedangkan unsur *tumbling* berisi gerak melenting, berputar, serta bergerak cepat di udara. *Tumbling* ini diwakili oleh *trapeze*, salto ungit (leverage sommersault), serta *trampolin* yang banyak mempertontonkan kombinasi salto dengan skrup (*twist*) yang kompleks.

Bedanya, dalam senam pesenam harus menguasai 4 hingga 6 alat, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sedangkan dalam sirkus, pemain hanya berkonsentrasi pada satu alat atau jenis gerak. Para pesenam yang sudah pensiun dari karier senamnya pasti dapat menekuni seni sirkus dengan mudah.

Di samping mempertunjukkan kemampuan manusia, sirkus pun tentu menyajikan pertunjukan binatang. Namun, pertunjukan binatang tersebut nampaknya tidak terlalu istimewa, karena kemampuan binatang dapat dikategorikan amat terbatas kemampuannya.

Daya tarik sirkus memang tidak diragukan. Semakin hari, atraksi yang muncul di arena sirkus kian bervariasi. Perkembangan teknologi dalam pembuatan alat bahkan mampu menambah spektakulernya atraksi yang ditampilkan. Tak heran jika keluarga Kerajaan Grimaldi dari Monaco rajin hadir dalam festival sirkus yang sering dilaksanakan di negerinya.

Dari perspektif sejarah, sirkus yang awalnya berkembang dari seni pertunjukan gladiator di abad ke 55 sebelum masehi ini, mulai berkembang sebagai sirkus modern pada tahun 1768. Seorang sersan mayor dari kavaleri Inggris, Philip Astley, mulai mengembangkan seni pertunjukan ini dengan membuka sebuah *amphiteater* di London.

Sirkus sendiri berkonotasi lingkaran, seperti sering terlihat dari bentuknya yang melingkar, di bawah naungan sebuah tenda besar-bulat, dengan deretan kursi penonton di sekelilingnya. Dulu, para penontonnya berdiri melingkar, dan setiap usai satu pertunjukan para pemainnya berkeliling dengan topinya meminta sumbangan penonton.

Pada abad 20, sirkus banyak berkembang di negara-negara Eropa Timur, dengan dedengkotnya negara Uni Sovyet. Di jaman itu, seni pertunjukan sirkus berkembang pesat karena ditunjang subsidi pemerintah. Hancurnya negara Uni Sovyet di tahun 1991, menyebabkan sirkus di negara-negara komunis itupun kehilangan dukungannya.

Di kawasan Asia, mungkin hanya Cina yang rajin mengembangkan sirkus. Banyak sekolah sirkus dan seni pertunjukan didirikan di sana, karena mendapat dukungan pemerintah. Seperti juga senamnya, sirkus Cina saat ini sudah dianggap sejajar dengan sirkus kelas dunia dari berbagai belahan Eropa.

Di Indonesia, sirkus tampaknya tidak berkembang karena kurang penekunnya. Walaupun masyarakat Indonesia cukup menggemari pertunjukan ini, mengherankan juga bahwa hanya satu nama yang bisa dihubungkan dengan sirkus Indonesia ini, yaitu Pak Tepong.

Penulis menduga, kurang berhasilnya program penjas di Indonesia bisa ditunjuk sebagai

salah satu penyebab mengapa sirkus dan beberapa aktivitas seni gerak dan olahraga kurang berkembang di negara kita.

Artinya, masyarakat kita tidak memiliki perbendaharaan (*repertoire*) gerak yang dapat ditekuni di masa-masa dewasanya, karena Penjas kita pun belum berhasil membangun dan menumbuhkan kreativitas para siswa dalam hal gerak. Guru penjas kita belum berhasil merangsang kemampuan mencipta dari siswanya, peralatannya terlalu bertumpu pada keharusan mengembangkan kemampuan reproduksi.

Pengajaran pada berbagai cabang olah raga formal seperti sepak bola, voli, renang, basket, dsb. dalam cara dan gaya yang formal, menyebabkan anak hanya dilatih kemampuan reproduksinya (meniru yang sudah ada). Akibatnya, anak tidak memiliki keberanian untuk mencoba hal baru, apalagi tumbuh keinginannya untuk mencipta.*** (penulis Dosen FPOK UPI

PORPROV, PEMBOROSAN ATAU PEMBERDAYAAN DAERAH?

Oleh AGUS MAHENDRA, MA.

HIRUK-PIKUK persiapan PORPROV 2006 sungguh menarik untuk disimak. Betapa tidak? Ketidaksiapan infrastruktur di pihak tuan rumah, termasuk bagaimana para 'penggede' KONI Jabar menghadapinya, dapat menjadi petunjuk menarik, tentang bagaimana kita menata olahraga selama ini.

Petunjuk pertama, betapa selama ini pemerintah (baik propinsi maupun kota dan kabupaten) kurang memprioritaskan pembangunan olahraga dan pembangunan di bidang olahraga. Buktinya, hingga memasuki abad 21 ini banyak daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai sekedar untuk menyelenggarakan event olahraga setingkat Porprov (dulu PORDA).

Kenyataan demikian sungguh memprihatinkan, karena hal itu membuktikan bahwa olahraga belum dipandang sebagai alat strategis untuk menumbuhkan modal sosial (*social capital*) dan elan vital masyarakat menuju masyarakat madani. Kita sungguh sudah jauh tertinggal oleh negara lain, yang sudah memperhitungkan nilai potensial olahraga dalam hampir berbagai aspek kehidupan.

Sudah selayaknya pemerintah memperhitungkan nilai strategis olahraga bagi upaya rekonstruksi sosial dan lingkungan (*eco-sport*), sehingga keyakinan itu tercermin dari kesungguhan pemerintah mempersiapkan infrastruktur olahraga secara terencana dan berkelanjutan. Pembangunan olahraga sudah sepatutnya masuk ke dalam

perencanaan menyeluruh pembangunan kota dan daerah secara terpadu.

Jika tidak, pembangunan infrastruktur olahraga hanya dilakukan sebagai reaksi sesaat karena ingin menjadi tuan rumah suatu event. Akibatnya, perencanaan lokasi dan disainnya sekedar asal jadi, yang berdampak pada kurang terpenuhinya prinsip *sustainability* dalam pembangunannya. Terlantarnya stadion eks-Porda di Indramayu adalah bukti pendekatan demikian.

Petunjuk berikutnya menyatakan, betapa olahraga kita belum dimanfaatkan untuk menumbuhkan ilmu dan SDM unggul di dalam lingkup olahraga sendiri. Akibat pola pikir yang relatif tidak berkembang dari tahun ke tahun, ilmu dan praksis olahraga di perguruan tinggi (PT) pun tidak jauh dari upaya mencetak guru dan pelatih olahraga semata.

Sebagai dampaknya, hingga sekarang kita tidak memiliki kepakaran dalam ilmu olahraga yang berkaitan dengan sarana dan prasarana olahraga, olahraga dan lingkungan hidup, manajemen olahraga, bisnis olahraga, teknologi olahraga, serta berbagai disiplin ilmu olahraga seperti sosiologi olahraga, filsafat olahraga, *sport pedagogy*, dan *sport psychology*.

Menjadikan ilmu-ilmu tematis di atas sebagai kepakaran, tentu perlu didukung oleh lahirnya program studi atau konsentrasi baru di PT kita. Sayangnya PT kita pun lebih cenderung menunggu, dengan alasan belum dibutuhkan masyarakat. Seharusnya, justru PT mampu mendorong tumbuhnya kebutuhan masyarakat melalui visi yang mampu diteropong oleh para akademisinya.

Kepakaran di bidang olahraga bisa tumbuh subur jika ditunjang oleh hadirnya laboratorium dari masing-masing bidang keilmuan. Di negara maju, laboratorium tersebut dipusatkan di setiap stadion yang ada, sehingga berguna baik bagi pengembangan batang tubuh keilmuan maupun bagi kepentingan pragmatis prestasi olahraga.

Dua simpulan di atas merupakan benang merah utama dari kelemahan olahraga di Indonesia selama ini, di samping pernah-pekik kelemahan lainnya. Jika Jawa Barat ingin unggul dalam bidang olahraga, dua kelemahan di atas harus pertamanya diurai terlebih dahulu, dengan menata potensi yang dimiliki. Hal ini merupakan keniscayaan agar daerah tidak selalu direpotkan soal persiapan PORPROV, yang lebih merupakan pemborosan semata-mata daripada sebagai upaya pemberdayaan daerah.

Mewujudkan hal itu tentu memerlukan sebuah strategi pencapaian. Pada era otonomi daerah dewasa ini, setiap kabupaten atau kota akan memandang penting prioritas pendidikan, khususnya dikaitkan dengan mempersiapkan SDM unggul bagi pembangunan daerahnya. Ke depan, niscaya daerah akan memandang perlu mendirikan perguruan tinggi negeri di masing-masing daerah, sebagai upaya

mengakselerasi pembangunan di segala bidang.

Pembangunan olahraga, terutama infrastrukturnya, dapat dikaitkan juga dengan upaya mempersiapkan SDM tersebut. Alangkah ideal jika pembangunan infrastruktur olahraga bisa dititipkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Jika kelak setiap pemerintah kota/kabupaten memiliki universitas negerinya masing-masing, maka di lokasi itu pulalah berdiri fasilitas olahraga yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan event setingkat PORPROV.

Sisi positif dari format demikian ada dua. Pertama, universitas yang bersangkutan terangkat prestisenya karena didukung fasilitas olahraga yang memadai, kedua, universitas pun mampu memberikan sumbangan bermakna dalam perkembangan ilmu, SDM, dan prestasi olahraga bagi daerah.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi kasus di mana sebuah stadion atau fasilitas olahraga 'merana' akibat tidak ada yang memanfaatkannya. Yang terlebih penting, itulah sebenarnya makna pemberdayaan olahraga bagi daerah dan bagi masyarakatnya, sehingga terbukti bahwa olahraga memang bermakna bagi kemaslahatan masyarakat. *** (Penulis: Dosen FPOK UPI).

Infrastruktur dan Suprastruktur Sama-sama Penting

Oleh Agus Mahendra

PENCANANGAN Gubernur Jabar agar seluruh kecamatan di Jawa Barat memiliki sarana olah raga minimal lapangan sepak bola dan trek atletik, merupakan berita menarik, dibandingkan berita tentang dimulainya rencana pembangunan sarana olah raga terpadu SOR mulai 2005. Mengapa begitu? Karena di situ terletak sebuah cara pandang (paradigma) dan latar belakang yang lebih komprehensif dalam konteks pembangunan olah raga daerah dewasa ini.

Jika SOR, yang katanya mengusung gagasan kawasan olah raga terpadu, didasari paradigma olah raga sebagai alat politik, maka sarana olah raga di kecamatan didasari paradigma olah raga sebagai daya dukung pembangunan dalam dimensi luas, yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Yang menariknya adalah, ketika masih kuatnya pemikiran yang berpihak pada olah raga sebagai *platform* politik tadi, tiba-tiba Gubernur Jabar melontarkan gagasan segar tentang olah raga untuk kepentingan masyarakat luas. Adakah hal ini dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah Jabar sudah mulai paham dan berpihak pada makna olah raga dalam dimensi luas; yang tidak hanya berkutat melulu pada upaya untuk bisa unggul di PON?

Jawaban dari pertanyaan di atas dapat kita nilai dari bagaimana pemerintah dan para

stake holders olah raga lainnya mengimplementasikan "pencanangan" dimaksud kelak.

Untuk sementara, marilah kita berharap bahwa langkah ke arah itu bukan janji kosong pemerintah. Mudah-mudahan pencanangan tadi tidak disalahartikan secara naif oleh para penanggung jawab di pelosok kecamatan, sehingga melenceng lagi dari sasaran awal.

Antisipasi tentang melencengnya sasaran tentu perlu diangkat di sini, mengingat ide atau gagasan pembangunan olah raga di kita umumnya masih dipahami secara sempit oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat olah raga sendiri.

Kita masih sering memandang olah raga dalam kaitannya dengan kata pembinaan yang berkonotasi pembinaan prestasi. Akibatnya, partisipasi masyarakat seakan-akan dipersempit bagi anak atau anggota masyarakat tertentu.

Sedangkan hak serta keriangannya masyarakat yang lebih luas tidak mendapat tempat, dan pupus secara alami karena tidak ada yang membangun serta membinanya.

Pembinaan olah raga masyarakat dalam arti luas tentu bukan hanya menyediakan tempat atau ruang publik yang memadai. Sama halnya dengan pencanangan sarana olah raga di seluruh kecamatan, yang baru merupakan langkah awal atau sebuah embrio dari gagasan yang lebih besar.

Artinya, dari segi infrastruktur, tidak cukup di satu kecamatan hanya ada sebuah lapangan sepak bola yang dilengkapi trek atletik. Lebih dari itu, sebuah wilayah perlu dilengkapi oleh ruang publik serta taman bermain (*playing grounds*) yang lebih beragam, yang desain serta kepentingannya disesuaikan dengan keunikan geografis setiap kecamatan.

Yang lebih penting dari tersedianya infrastruktur adalah suprastruktur. Suprastruktur berkaitan dengan program, isi kegiatan, serta para pelaksananya, yang diarahkan untuk terus menerus melakukan stimulasi, pelayanan, pembinaan dan edukasi pada masyarakat melalui olahraga.

Khusus dalam kaitannya dengan suprastruktur ini, penulis teringat kepada struktur pemerintahan Kota Macao, salah satu kota wilayah administratif khusus di Cina, yang di dalamnya memiliki sebuah dewan yang bernama *Council of Park, Sport and Recreation* (Dewan Taman, olah raga dan Rekreasi). Tugas dewan ini, di samping mengurus dan merawat taman kota, juga menyediakan program-program pelayanan dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kebugaran dan kesehatan para penduduk melalui olah raga dan rekreasi di taman-taman kota.

Mungkinkah struktur semacam itu masuk atau ditempelkan ke dalam struktur dinas yang ada di berbagai kabupaten/kota? Saya menganggap hal itu memungkinkan, terutama untuk kabupaten atau kota yang sudah memiliki dinas pertamanan atau tata kota. Hemat penulis, tambahan 1 atau 2 orang personel untuk olah raga rekreasi ini tidak akan membebani pemerintah.

Jika dinas ini diaktifkan dan mampu membawahi kecamatan-kecamatan di bawah wilayahnya, maka menjadi tugas mereka untuk merancang program yang mampu mengisi program olah raga masyarakat.

Bahkan, dalam programnya, dinas ini pun dapat membidik para remaja dan anak-anak untuk aktif terlibat, sehingga menjadi salah satu pengganti institusi nonformal yang sudah lama hilang dari masyarakat perkotaan. Ini penting, mengingat sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan kita belum mampu menyediakan kegiatan dengan fungsi serupa.

Jika hal ini dapat terealisasi, penulis beranggapan, inilah salah satu contoh implementasi butir-butir ketentuan yang ada dalam RUU olah raga yang menyangkut kewajiban pemerintah dalam olah raga.

Di samping itu, ekses dari kegiatan GESAT yang sekarang banyak mengganggu kelancaran lalu lintas seperti di daerah Gedung Sate setiap hari Minggu, niscaya akan dapat diredam. Lebih dari itu, manfaat dan keuntungan dari sisi lainnya, tentunya juga dapat semakin dioptimalkan. ***

TIGA PILAR PEMBINAAN HARUS DIJALANKAN PENGDA

Oleh AGUS MAHENDRA, MA.

RAPARDA KONI Jabar yang baru lalu banyak tersita oleh pembicaraan tentang persiapan PORPROV (pengganti PORDA) 2006 mendatang. Ini membuktikan satu hal, bahwa titik pusat perhatian insan olahraga kita masih berpusar di acara-acara seremonial seperti Porprov atau PON.

Penulis sebenarnya memendam kekecewaan tentang hal itu, mengingat dari semula sudah berharap banyak terhadap Raparda tersebut. Sebagai warga Jabar, rasanya tidaklah berlebihan jika sedikit terobsesi bahwa para utusan olahraga terbaik Jabar itu tidak melupakan satu hal yang paling esensial dari daya hidup olahraga Jabar, yaitu esensi pembinaan itu sendiri.

Pembinaan, seperti dapat dimengerti dari maknanya, mengandung sebuah perjalanan berproses, yang tidak berhenti di sekitar sebuah kejuaraan atau pekan olahraga. Jika fokus kita hanya pada Porprov, tidak peduli sudah dibatasi oleh batasan usia, maka disitu kita sudah mengabaikan proses tadi.

Sayangnya, KONI Jabar juga tidak pernah ingin memanfaatkan acara seperti Raparda untuk menilai perkembangan olahraga Jabar dalam konteks dan dimensi luas. KONI hanya fokus pada event-event olahraga besar, seolah-olah tugasnya hanya menjadi koordinator

para Pengda menghadapi kejuaraan daerah atau nasional.

Untuk bisa membalik keadaan tersebut, sebenarnya KONI dapat menuntut setiap Pengda untuk merumuskan sistem pembinaannya masing-masing, yang diorientasikan bukan hanya pada program Pelatda saja, tetapi juga pada format pembinaan yang sesungguhnya.

Misalnya, Pengda dapat diarahkan untuk *back-to-basics* melaksanakan *tiga pilar utama* pembinaannya, yaitu pemassalan, pembibitan dan pemuncakan prestasi. Alasannya, hampir semua Pengda di Jabar dewasa ini sudah melupakan dua pilar pertamanya, karena lebih berkonsentrasi pada proses pemuncakan prestasi.

Yang dilakukan Pengda selama ini lebih banyak mencomot atlet berbakat untuk secara dini dimasukkan ke dalam program khusus yang disebut Pelatda. Kemudian, Pengda berkonsentrasi pada mereka yang 'terpilih' tersebut dalam satu periode tertentu dan melupakan tugas lain, termasuk dalam hal memperbanyak dan membina klub-klub olahraganya yang semestinya mampu menjalankan program pemassalan dan pembibitan.

Upaya pemassalan dan pembibitan memang hanya bisa dilakukan dengan cara memperbanyak klub olahraga yang bersangkutan, kalau perlu di setiap pelosok. Oleh karena itu, Pengda harus berupaya 'membumikan' programnya ke masyarakat umum agar lebih banyak orang yang mau dan mampu mendirikan klub olahraga di wilayahnya masing-masing (di sini tidak disinggung peranan Pengcab, mengingat keterbatasan ruang).

Untuk itu, idealnya setiap Pengda mampu mengembangkan sistem pembinaannya secara komprehensif, yang memungkinkan banyak pihak melaksanakan program Pengda dalam bentuk klub. Untuk itu diperlukan seperangkat aturan, panduan, kurikulum, serta strategi pengelolaan, yang disebut sistem.

Sebagai contoh, jika seorang anggota masyarakat hendak mendirikan klub, ia akan mendapat informasi apapun yang dibutuhkannya dalam kaitan mendirikan klub. Informasi itu meliputi persyaratan mendirikan klub, kurikulum standar tentang materi yang harus diberikan pada anggotanya (kalau perlu dalam bentuk *levelling*), komposisi peringkat pelatih dan manajer klub yang dapat dipekerjakannya, kapan dan jenis kompetisi apa saja yang diprogramkan, hingga pada penataran pelatih, wasit dan manajer klub yang akan dilaksanakan.

Tanpa sistem, beberapa Pengda memang sudah 'jalan' dengan format seperti itu, tetapi konsistensinya sulit dipertahankan karena tergantung pada individu yang komit. Ketika kepengurusan berganti, mereka kembali harus mencari-cari format dan harus selalu mulai dari awal.

Untuk 'menuntut' Pengda menciptakan sistem dan melaksanakannya, dibutuhkan kesadaran penuh dari KONI Jabar untuk tidak memandang tugasnya hanya mengkoordinasi Pengda menghadapi PON semata-mata. Tugas KONI untuk mengembangkan olahraga prestasi, adalah termasuk juga membina Pengda menjalankan tiga pilar utamanya secara

optimal, yang tidak didapatnya dari PB-PB.

Konsekuensinya, baik di KONI Jabar maupun di Pengda-Pengda diperlukan kehadiran orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan sistem dimaksud. Itulah peran dan fungsi yang selayaknya disandang oleh para Ketua Bidang Organisasi di KONI dan Pengda, yang selama ini lebih berperan simbolis semata. Konsekuensi lain tentu berkaitan dengan dana pembinaan, yang tidak hanya difokuskan untuk Pelatda dan persiapan PON saja.***
(Penulis: Dosen FPOK UPI).

OLAHRAGA BUKAN TUJUAN AKHIR KEHIDUPAN

Oleh AGUS MAHENDRA, MA.

ISU kepindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain menjelang PON diangkat oleh Menpora pada acara Raparnas KONI Pusat di Samarinda. Dikatakannya, hal itu merupakan kesalahan daerah dalam menangkap makna PON, sehingga banyak daerah yang melakukan jalan pintas membeli atlet berprestasi, tanpa mau bersusah payah melakukan pembinaan.

Tema yang diangkat Menpora bukanlah hal baru, sebenarnya. Sudah banyak pihak yang berusaha mengangkat persoalan tersebut sejak jauh-jauh hari, mengingat dampaknya kepada pembinaan secara keseluruhan. Bahkan ada pihak yang menyatakan bahwa PON lebih banyak mudorotnya dan sebaiknya dihapuskan sama sekali.

Pemerintah dan KONI pun (baik KONI Pusat maupun KONIDA) bukan tidak menyadari fenomena demikian yang sudah sangat menggejala di banyak daerah. Namun mengherankan, pemerintah dan KONI pun bisanya cuma bungkam. Bahkan, usulan untuk melakukan studi atas penyelenggaraan PON dan berbagai dampaknya dari sudut pandang falsafah dan sosiologi olahraga pun tidak pernah mendapat perhatian pemerintah serta KONI.

Adapun daerah-daerah propinsi yang terkena langsung dampaknya juga lebih memilih menerapkan standar ganda. Ketika daerahnya dirugikan, ia berteriak-teriak penuh amarah ketika atletnya diketahui dibujuk dan pindah ke daerah lain. Tetapi pada saat yang lain, daerah itu berusaha mati-matian membantu kepindahan atlet ke daerahnya, sekalipun dengan memanipulasi data serta prosedur yang ditetapkan.

Dilihat dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa kepindahan atlet melibatkan dua belah pihak yang satu sama lain saling berkaitan. Di satu sisi ada atlet yang bersedia pindah, apapun alasannya; baik karena ia memang oportunis bonus maupun karena sebab-sebab lain yang lebih rasional seperti pindah tugas kerja atau studi. Di pihak lain, ada daerah yang membutuhkan karena mengharapkan daya dongkrak atlet yang baru pindah tersebut bagi kepentingan daerahnya.

Penelusuran sederhana pada kasus kepindahan atlet menunjuk pada beberapa sebab. *Pertama*, dan mungkin ini yang menjadi pemicu utama, adalah diterapkannya kebiasaan

pemberian bonus pada atlet yang berprestasi. Semula bonus ini hanya diberikan kepada para atlet yang biasanya berhasil membela nama bangsa di events internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.

Berikutnya, kebiasaan ini menular pada beberapa daerah propinsi makmur, yang juga memberi bonus pada atletnya yang berprestasi di PON. Entah bagaimana, mungkin akibat ekspose besar-besaran dari media massa, propinsi-propinsi makmur ini seolah bersaing jor-joran memberikan sebesar-besarnya bonus, sehingga seolah terjadi 'perang bonus'. Akhirnya, pemberian bonus inipun seolah menjadi trend utama di semua tingkat event olahraga, yang juga mengembus ke propinsi-propinsi lain.

Itulah akhirnya yang membuat semua atlet memandang bahwa bonus adalah tujuan utama keterlibatannya dalam olahraga prestasi. Tanpa bonus, tidak ada prestasi. Jika daerah asal tidak memberi bonus layak, mengapa tidak mencari daerah lain yang bisa, demi memperbaiki nasib hidupnya. Para ahli psikologi olahraga memandang gejala ini sebagai, *turning play into work*.

Kedua, kepindahan atlet bisa juga dipicu oleh sakit hati. Banyak atlet yang pindah ke daerah lain didorong sakit hati karena merasa tidak diperhatikan daerah dan para pembinaanya. Ini menunjukkan bahwa pembinaan belum menjadi kata kunci keberhasilan olahraga Indonesia.

Banyak daerah yang baru aktif melakukan pembinaan serta memperhatikan atletnya di sekitar pelaksanaan event bergengsi, dalam bentuk pemberian uang transport, uang saku, uang kesehatan, serta peralatan latihan. Tetapi, setelah event itu berlalu, biasanya daerah itupun kembali kepada rutin semula, yaitu tidak melakukan apa-apa.

Atlet yang semula merasa dibutuhkan, tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak dibutuhkan lagi. Di situ terjadi semacam perasaan "habis manis sepah dibuang." Apalagi bagi atlet yang tadinya merasa dijanjikan macam-macam, seperti pekerjaan, kemudahan tertentu, atau bentuk janji lain.

Dapatkah kecenderungan kepindahan atlet dieliminir oleh sebuah ketentuan payung hukum seperti dikemukakan Menpora? Menurut hemat penulis, amat sulit. Bagaimana ketatnya pun payung hukum yang diberlakukan, selalu ada celah untuk dicari kelemahannya.

Minimal ada dua hal yang harus diupayakan, yaitu mencoba mengubah paradigma kemajuan daerah dalam olahraga, dan kedua mengubah paradigma tentang olahraga sebagai gantungan hidup.

Makna PON bagi daerah propinsi sebagai adu kekuatan memang sudah tidak tepat lagi. Sudah saatnya PON dikembalikan maknanya menjadi Pesta Olahraga Nasional, yang tidak perlu selalu dikaitkan dengan medali. Sedangkan kemajuan daerah bisa diukur oleh sesuatu yang lain, misalnya oleh SDI (*Sport Development Index*) yang diusulkan oleh

Ditjen Olahraga, misalnya.

Dalam SDI ala Indonesia dinyatakan bahwa kemajuan olahraga suatu daerah diukur oleh kualitas dan kuantitas empat komponen, yaitu kebugaran jasmani penduduknya, jumlah fasilitas olahraga yang dimiliki daerah, jumlah SDM keolahragaan, serta jumlah partisipasi penduduknya dalam olahraga. Inilah yang harus dijadikan sasaran daerah.

Sedangkan dalam hal cara pandang kita terhadap olahraga, inipun sudah saatnya diubah. Selama ini kita memandang olahraga sebagai sebuah terminal dari perjalanan hidup atlet atau individu yang terlibat. Akibatnya, banyak orang tua dan atlet yang kecewa bahwa ternyata olahraga tidak bisa memberikan apa-apa bagi karir dan kehidupannya.

Seharusnya olahraga dipandang sebagai sebuah tahapan, yang jika dilalui akan memberi makna dan sumbangan yang baik bagi perkembangan seseorang. Mari kita simak ungkapan *Udolf Ogi*, seorang penasehat khusus Sekjen PBB dalam Olahraga bagi Pembangunan dan Perdamaian, yang juga mantan Presiden dari negara Swiss.

Bagi Mr. Ogi, olahraga adalah sekolah terbaik bagi kehidupan, yang mengajarkan kecakapan hidup dan membantunya menjadi warganegara yang baik. Ketika makna ini dipahami secara bernas, maka siapapun akan menerima bahwa olahraga bukan tujuan akhir yang harus dijadikan tumpuan untuk memberikan nafkah atau penghasilan. Ia hanya menjadi sarana yang mengantarkan seseorang untuk sukses dalam kehidupan dan karir yang dipilihnya. *** (Penulis: Dosen FPOK UPI).

OLAHRAGA BUKAN TUJUAN AKHIR KEHIDUPAN

Oleh AGUS MAHENDRA, MA.

ISU kepindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain menjelang PON diangkat oleh Menpora pada acara Raparnas KONI Pusat di Samarinda. Dikatakannya, hal itu merupakan kesalahan daerah dalam menangkap makna PON, sehingga banyak daerah yang melakukan jalan pintas membeli atlet berprestasi, tanpa mau bersusah payah melakukan pembinaan.

Tema yang diangkat Menpora bukanlah hal baru, sebenarnya. Sudah banyak pihak yang berusaha mengangkat persoalan tersebut sejak jauh-jauh hari, mengingat dampaknya kepada pembinaan secara keseluruhan. Bahkan ada pihak yang menyatakan bahwa PON lebih banyak mudorotnya dan sebaiknya dihapuskan sama sekali.

Pemerintah dan KONI pun (baik KONI Pusat maupun KONIDA) bukan tidak menyadari fenomena demikian yang sudah sangat menggejala di banyak daerah. Namun mengherankan, pemerintah dan KONI pun bisanya cuma bungkam. Bahkan, usulan untuk melakukan studi atas penyelenggaraan PON dan berbagai dampaknya dari sudut pandang falsafah dan sosiologi olahraga pun tidak pernah mendapat perhatian

pemerintah serta KONI.

Adapun daerah-daerah propinsi yang terkena langsung dampaknya juga lebih memilih menerapkan standar ganda. Ketika daerahnya dirugikan, ia berteriak-teriak penuh amarah ketika atletnya diketahui dibujuk dan pindah ke daerah lain. Tetapi pada saat yang lain, daerah itu berusaha mati-matian membantu kepindahan atlet ke daerahnya, sekalipun dengan memanipulasi data serta prosedur yang ditetapkan.

Dilihat dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa kepindahan atlet melibatkan dua belah pihak yang satu sama lain saling berkaitan. Di satu sisi ada atlet yang bersedia pindah, apapun alasannya; baik karena ia memang oportunistik bonus maupun karena sebab-sebab lain yang lebih rasional seperti pindah tugas kerja atau studi. Di pihak lain, ada daerah yang membutuhkan karena mengharapkan daya dongkrak atlet yang baru pindah tersebut bagi kepentingan daerahnya.

Penelusuran sederhana pada kasus kepindahan atlet menunjuk pada beberapa sebab. *Pertama*, dan mungkin ini yang menjadi pemicu utama, adalah diterapkannya kebiasaan pemberian bonus pada atlet yang berprestasi. Semula bonus ini hanya diberikan kepada para atlet yang biasanya berhasil membela nama bangsa di events internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.

Berikutnya, kebiasaan ini menular pada beberapa daerah propinsi makmur, yang juga memberi bonus pada atletnya yang berprestasi di PON. Entah bagaimana, mungkin akibat ekspose besar-besaran dari media massa, propinsi-propinsi makmur ini seolah bersaing jor-joran memberikan sebesar-besarnya bonus, sehingga seolah terjadi 'perang bonus'. Akhirnya, pemberian bonus inipun seolah menjadi trend utama di semua tingkat event olahraga, yang juga mengembus ke propinsi-propinsi lain.

Itulah akhirnya yang membuat semua atlet memandang bahwa bonus adalah tujuan utama keterlibatannya dalam olahraga prestasi. Tanpa bonus, tidak ada prestasi. Jika daerah asal tidak memberi bonus layak, mengapa tidak mencari daerah lain yang bisa, demi memperbaiki nasib hidupnya. Para ahli psikologi olahraga memandang gejala ini sebagai, *turning play into work*.

Kedua, kepindahan atlet bisa juga dipicu oleh sakit hati. Banyak atlet yang pindah ke daerah lain didorong sakit hati karena merasa tidak diperhatikan daerah dan para pembinaanya. Ini menunjukkan bahwa pembinaan belum menjadi kata kunci keberhasilan olahraga Indonesia.

Banyak daerah yang baru aktif melakukan pembinaan serta memperhatikan atletnya di sekitar pelaksanaan event bergengsi, dalam bentuk pemberian uang transport, uang saku, uang kesehatan, serta peralatan latihan. Tetapi, setelah event itu berlalu, biasanya daerah itupun kembali kepada rutin semula, yaitu tidak melakukan apa-apa.

Atlet yang semula merasa dibutuhkan, tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak dibutuhkan lagi. Di situ terjadi semacam perasaan "habis manis sepagh dibuang." Apalagi bagi atlet

yang tadinya merasa dijanjikan macam-macam, seperti pekerjaan, kemudahan tertentu, atau bentuk janji lain.

Dapatkah kecenderungan kepindahan atlet dieliminir oleh sebuah ketentuan payung hukum seperti dikemukakan Menpora? Menurut hemat penulis, amat sulit. Bagaimana ketatnya pun payung hukum yang diberlakukan, selalu ada celah untuk dicari kelemahannya.

Minimal ada dua hal yang harus diupayakan, yaitu mencoba mengubah paradigma kemajuan daerah dalam olahraga, dan kedua mengubah paradigma tentang olahraga sebagai gantungan hidup.

Makna PON bagi daerah propinsi sebagai adu kekuatan memang sudah tidak tepat lagi. Sudah saatnya PON dikembalikan maknanya menjadi Pesta Olahraga Nasional, yang tidak perlu selalu dikaitkan dengan medali. Sedangkan kemajuan daerah bisa diukur oleh sesuatu yang lain, misalnya oleh SDI (*Sport Development Index*) yang diusulkan oleh Ditjen Olahraga, misalnya.

Dalam SDI ala Indonesia dinyatakan bahwa kemajuan olahraga suatu daerah diukur oleh kualitas dan kuantitas empat komponen, yaitu kebugaran jasmani penduduknya, jumlah fasilitas olahraga yang dimiliki daerah, jumlah SDM keolahragaan, serta jumlah partisipasi penduduknya dalam olahraga. Inilah yang harus dijadikan sasaran daerah.

Sedangkan dalam hal cara pandang kita terhadap olahraga, inipun sudah saatnya diubah. Selama ini kita memandang olahraga sebagai sebuah terminal dari perjalanan hidup atlet atau individu yang terlibat. Akibatnya, banyak orang tua dan atlet yang kecewa bahwa ternyata olahraga tidak bisa memberikan apa-apa bagi karir dan kehidupannya.

Seharusnya olahraga dipandang sebagai sebuah tahapan, yang jika dilalui akan memberi makna dan sumbangan yang baik bagi perkembangan seseorang. Mari kita simak ungkapan *Udolf Ogi*, seorang penasehat khusus Sekjen PBB dalam Olahraga bagi Pembangunan dan Perdamaian, yang juga mantan Presiden dari negara Swiss.

Bagi Mr. Ogi, olahraga adalah sekolah terbaik bagi kehidupan, yang mengajarkan kecakapan hidup dan membantunya menjadi warganegara yang baik. Ketika makna ini dipahami secara bernas, maka siapapun akan menerima bahwa olahraga bukan tujuan akhir yang harus dijadikan tumpuan untuk memberikan nafkah atau penghasilan. Ia hanya menjadi sarana yang mengantarkan seseorang untuk sukses dalam kehidupan dan karir yang dipilihnya. *** (Penulis: Dosen FPOK UPI).

Senin, 3
September
2001

**Pendidikan Jasmani:
Mau
Dibawa ke
Mana?
DIDAKTIKA
(Kompas)**

PEMBENTUKAN Komisi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga atau KNPJO (*Kompas*, 2 Agustus 2001) oleh Depdiknas sungguh mengejutkan. Di tengah upaya perumusan kurikulum "penjas berbasis kompetensi" yang sedang digarap dan diujicobakan Balitbang Depdiknas, kehadiran KNPJO- jika tidak diingatkan- dikhawatirkan dapat mempengaruhi rumusan kurikulum pendidikan jasmani (penjas) berbasis kompetensi yang baru rampung penyusunannya; dan lebih jauh dari itu, malahan akan mengarah pada hadirnya struktur kurikulum penjas yang lebih menjerumuskan.

Kekhawatiran demikian wajar karena paradigma yang dijadikan landasan pembentukan KNPJO tampaknya bertentangan dengan upaya reformasi yang tengah dilakukan pada bidang studi penjas, yang selama ini dipandang sangat olahraga sentris. Mayoritas anggota komisi yang berlatar belakang dan pendukung fanatik olahraga kompetitif, mengindikasikan bahwa penjas akan semakin dibebani tugas yang sangat *sport-base*, yang justru ditunjuk sebagai sumber penyebab kegagalan program penjas di sekolah-sekolah selama ini.

Menjadi pertanyaan besar bagi para pendukung penjas bahwa kehadiran KNPJO ini akan berhasil membawa perubahan positif bagi perbaikan program penjas yang bermutu. Yang justru mengemuka adalah pertanyaan bernada khawatir: "Mau dibawa ke mana pendidikan jasmani kita?"

SUDAH bukan rahasia bahwa kelemahan program penjas di Indonesia selama ini adalah masih mengakar pada kuatnya paradigma keolahragaan di sekolah. Guru-guru penjas kurang memahami perbedaan filosofis antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, sejak kedua istilah itu dipertukarkan pada kurikulum tahun 1984. Para guru menganggap bahwa perubahan nama sekadar perubahan *trend*. Padahal, muatan filosofis dari keduanya sungguh jauh berbeda sehingga arah tujuannya pun berbeda pula.

Pendidikan jasmani berarti program pendidikan melalui gerak, permainan, dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah sebagai alat untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan: keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, termasuk keterampilan emosional dan sosial.

Oleh karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Bagaimana guru memilih metode, melibatkan anak, berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya harus menjadi pertimbangan utama.

Di seberang yang lain, pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga. Kepada murid diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasainya. Yang ditekankan adalah "hasil" dari pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani

pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai.

Dalam perbedaan nuansa di atas, yang terasa nyata adalah pendidikan olahraga memiliki premis yang berbeda dengan pendidikan jasmani. Penjas bersifat inklusif dan melibatkan semua anak dalam seluruh adegan pembelajaran. Dalam pendidikan olahraga-karena orientasinya ditekankan pada keterampilan formal dari cabang olahraganya-proses pembelajaran lebih bercorak eksklusif dengan hanya memberi tempat kepada yang berbakat, serta menyisihkan yang tidak berminat dan kurang mampu.

DENGAN kesadaran di atas, para penyusun kurikulum penjas berbasis kompetensi telah merumuskan berbagai langkah yang berpeluang mampu memperbaiki kelemahan program penjas. Di antaranya dengan menetapkan berbagai kompetensi dasar bagi setiap kelompok umur siswa, dan melepaskan kewajiban guru penjas dari hanya memenuhi tuntutan GBPP dan target, seperti selama ini terjadi. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolahnya.

Sinyalemen bahwa kurikulum penjas selama ini masih terlalu berorientasi pada aspek teoritis juga tidaklah benar. Yang benar adalah, program evaluasi penjas seolah bisa diwakili oleh pengukuran aspek teoritis sehingga tidak melihat perkembangan yang terjadi dalam aspek motorik dan kebugaran jasmaninya. Namun, masalah terakhir tersebut sudah diatasi dengan dikeluarkannya suplemen kurikulum penyempurnaan, yang mengharuskan penilaian keberhasilan program penjas dilaksanakan secara lengkap, mencakup aspek kognitif, kebugaran jasmani, serta keterampilan gerak olahraga.

Dengan demikian, permasalahan mutu program penjas, seperti yang dikemukakan sebagai dasar pembentukan KNPJO, sudah tidak aktual dan kontekstual lagi. Jika pun tugas KNPJO masih dilanjutkan, hendaknya mereka berkonsentrasi pada peningkatan kualitas program ekstrakurikuler, yang memang lebih sesuai dengan tujuan untuk mencari atlet berbakat. Adapun program penjas sebagai program intrakurikuler, mohon tidak diabrak-abrik lagi dengan alasan memperbaiki mutu penjas. Alih-alih, penjas kita malahan akan semakin tersungkur.

Percayalah, buruknya kualitas prestasi olahraga Indonesia bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas program penjas di sekolah, tetapi lebih karena belum dimilikinya "budaya olahraga" secara umum.

(Agus Mahendra MA, dosen FPOK UPI, anggota tim perumus kurikulum penjas berbasis kompetensi)

September 2008

Kita tak Serius Garap Sistem Kompetisi OR

Oleh AMUNG MA`MUN dan AGUS MAHENDRA

PETA prestasi olah raga Indonesia sedang berada dalam tren menurun. Sejak SEA Games Malaysia (2001), SEA Games

Filipina (2003), SEA Games Vietnam (2005), dan terakhir SEA Games Nakhon Ratchasima, Thailand (2007), prestasi Indonesia sudah menunjukkan *declining phase* yang amat terasa. Dalam empat SEA Games terakhir itu, baik dari sisi peringkat maupun dari perolehan jumlah medali (emas), grafik yang tampak tidak pernah beranjak naik kembali.

Demikian juga dalam Asian Games. Prestasi Indonesia sejak tahun 1998 di Bangkok hingga 2006 di Qatar, sama-sama terkena gejala penurunan, terutama jika dibandingkan dengan prestasi yang diraih oleh negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Bahkan, jika bandingannya diperluas dengan mengedepankan olimpiade, terasa sekali penurunan prestasi olah raga Indonesia itu amat memprihatinkan. Indonesia hanya mampu mengandalkan bulu tangkis, yang mulai dipertandingkan pada Olimpiade Barcelona 1992. Jika tidak ada bulu tangkis, mungkin hingga sekarang kita belum memperoleh medali emas di ajang olimpiade.

Mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengapa olah raga kita mengalami penurunan tajam? Jawabannya dapat amat beragam. Mulai dari tuduhan bahwa Indonesia tidak memiliki program makro dalam pembinaan dan kompetisi olah raga hingga pengakuan bahwa Indonesia memang tidak memiliki SDM keolahragaan yang memadai.

Di balik semua kenyataan pahit tersebut, sebenarnya kita dapat mengangkat pelajaran berharga dari PON XVII 2008 Kaltim. Dari banyaknya peristiwa yang timbul dalam PON tersebut, kita dapat merefleksikan bahwa kelemahan-kelemahan itu salah satunya karena tidak seriusnya kita menggarap sistem kompetisi olah raga nasional (SKON), seperti PON, kejurnas, pomnas, dan bahkan popnas.

Artinya, meskipun sistem pembinaan olah raga sudah dirumuskan dan diimplementasikan sedemikian baiknya, prestasi olah raga kita tetap akan terhambat oleh SKON yang masih belum ditata baik.

Dari contoh kasus PON XVII, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem kompetisi OR nasional kita dapat dikatakan tidak mendukung proses pembinaan murni daerah yang memiliki atlet.

Mudahnya atlet mutasi dari satu daerah ke daerah lain dan hilangnya idealisme beberapa PB cabor dalam hal jual beli pertandingan, merupakan gambaran nyata bahwa SKON tidak dilindungi oleh ketentuan hukum dan sistem yang berakar pada nilai luhur keolahragaan. Setiap porda atau PON, sekelompok atlet bermigrasi secara besar-besaran. Dari PON ke PON, masalah itu terus dikeluhkan, tanpa ada yang berusaha mencari solusinya melalui perbaikan sistem.

Dari hitung-hitungan sederhana pada 17 dari 43 cabor yang dipertandingkan pada PON XVII, Kaltim telah melibatkan 50 atlet hasil mutasi dari daerah-daerah lain. Dari 17 cabor tersebut, Kaltim memperoleh 28 medali emas dan 15 perak.

Dapat dibayangkan jika hitungan itu melibatkan semua cabor. Akan kita ketahui bahwa hampir 60 persen medali emas Kaltim diperoleh dari atlet yang mutasi secara instan. Jika cara Kaltim ini nanti diikuti oleh calon tuan rumah PON berikutnya (Riau), tidak bisa dibayangkan apa jadinya olah raga kita kelak.

Tanpa guideline yang jelas, PON kemudian akan menjadi gurita raksasa yang menelan korban tanpa pandang bulu. Daerah potensial penghasil atlet lambat laun akan frustrasi dengan kondisi itu, terutama ambisi tuan rumah yang hanya memerhatikan hasil akhir.

Kecenderungan yang tidak kondusif tersebut di antaranya adalah penetapan nomor dan cabor yang seolah tak terkendali dan tidak berorientasi pada event besar di atasnya. Dengan ambisi pemerataan serta ego cabor-cabor olahraga anggota KONI Pusat, nomor-nomor yang dipertandingkan di PON terus bertambah tanpa kendali (lihat table). Bandingkan dengan penambahan jumlah cabor atau nomor di SEA Games, Asian Games, dan olimpiade, yang relatif masih memperlihatkan adanya kendali.

Tabel Jumlah Nomor yang Dipertandingkan pada PON
Dibandingkan dengan nomor pada Events Lain

NO	EVENT	PERIODE TAHUN				
		1	PON	JAKARTA (1993) 434	JAKARTA (1996) 508	SURABAYA (2000) 553
2	SEA GAMES	KUALA LUMPUR (2001) 393	MANILA (2003) 444	HO CHI MIN (2005) 444	NAKON Ratchasima (2007) 477	LAOS XXVII/2009 ???
3	ASIAN GAMES	(1994) 335	BANGKOK (1998) 379	BUSAN (2002) 427	QATAR (2006) 428	GUANGZO (2010) ???
4	OLYMPIC GAMES	BARCELONA (1992) 260	ATLANTA (1996) 270	SIDNEY (2000) 298	ATHENA (2004) 301	BEIJING (2008) 303

Masih banyak contoh kasus yang dapat diangkat untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sistem kompetisi olah raga yang jelas. Dalam PON, kejuanas, pomnas, dan popnas, tidak ada batasan yang jelas tentang usia atlet. Untuk cabor mungkin sudah ada ketentuan, tapi landasan apa yang mendasarinya?

Di pihak lain, sistem penghargaan terhadap atlet pun belum tersistem. Sementara pihak dunia usaha belum mampu menyediakan pola sponsorship yang jelas bagi atlet melalui sistem kontrak dan bagi hasil iklan model-model produk industri olah raga. pemerintah belum menetapkan reward system yang memadai.

Kondisi ini berakibat pada tidak konsistennya pembinaan atlet dalam jangka panjang sehingga mengarah pada tidak jalannya pembinaan di daerah. Lalu, para atlet hanya berharap dari bonus dan pemberian penghargaan yang selalu digembargemborkan pemerintah daerah pada setiap kali PON atau porda. Karena besaran bonus tidak ada patokannya, setiap daerah seolah berlomba-lomba menetapkan besaran bonus yang jorjoran.

Dengan menyadari persoalan tersebut, dapat diyakini bahwa banyak hal harus dilakukan untuk mengubahnya. Keberhasilan kita semua melakukannya akan berdampak positif secara nyata kepada sistem pembinaan olah raga secara keseluruhan. Pada gilirannya akan mendongkrak prestasi olah raga Indonesia di masa-masa yang akan datang. ***

Penulis, pengurus KONI Jawa Barat.